

STRATEGI TIONGKOK UNTUK MENJADI KEKUATAN HEGEMONI DI LAUT NATUNA UTARA

Oleh : Monita Purba

monitamaulida@gmail.com

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si

Bibliography :14 Journals, 11 Books, 8 Official Documents, 16 Websites

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research examines about the strategies which China does to ASEAN engaging territorial dispute in North Natuna Sea. The goal of the strategies is to make China become a hegemonic power in North Natuna Sea region. North Natuna Sea has large amount of resources, especially oil and natural gas. That is why China wants to be the hegemonic power in order to have the maritime rights to exploit the sea resources. The strategies examined in this research are military, economic and political strategy. The strategies which examined are not only about the strategies done to ASEAN as an organization, but also to each of ASEAN's member. China seems to have a special approach to each of ASEAN's member to build a strong tie. With their economic power, China increases their corporation and investment with ASEAN. While giving many economic aids, China also strengthen and increase their military power to deter ASEAN. With their military, economic and political strategies, China hopes that ASEAN will not be able to restrict China's will to develop and exploit the North Natuna Sea.

Key Words: North Natuna Sea, hegemony, strategy, territorial dispute, ASEAN

Pendahuluan

Kawasan perairan Laut Natuna Utara merupakan kawasan sengketa teritorial antara negara-negara wilayah Asia Tenggara dengan Tiongkok. Sengketa teritorial terkait batas wilayah dan klaim pulau-pulau kecil di perairan ini, terjadi akibat klaim tumpang tindih. Tiongkok menyatakan klaimnya atas wilayah Laut Natuna Utara pada tahun 1947 dengan membuat sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) di peta nasional Tiongkok yang mengklaim seluruh kepulauan yang ada di Laut Natuna Utara. Klaim Tiongkok ini ditentang oleh beberapa negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Indonesia karena menyinggu dan mengambil wilayah mereka juga.

Laut Natuna Utara mempunyai arti penting bagi perdagangan regional dan internasional. Dalam lingkup regional, Laut Natuna Utara merupakan jalur pelayaran kapal-kapal niaga dan tanker-tanker minyak yang menghubungkan Korea, Jepang, Tiongkok dan Rusia dari dan ke negara-negara Asia Tenggara. Dalam lingkup internasional, Laut Natuna Utara merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa, Afrika dan Timur Tengah melalui Selat Malaka. Penguasaan wilayah ini akan memberikan devisa bagi negara yang menguasainya melalui pajak bagi yang melintasinya, baik pelayaran maupun penerbangan¹.

Walaupun hanya terlibat sengketa wilayah dengan Asia Tenggara, namun kekuatan lain seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Rusia juga ikut campur dalam konflik Laut Natuna Utara. Amerika dan Jepang bersama berusaha untuk menyaingi militer Tiongkok di Laut Natuna Utara, sementara Rusia turut serta

membantu Tiongkok mengatasi militer Amerika dan Jepang.² Tiongkok mempunyai kepentingan di kawasan Asia Tenggara untuk menjadi kekuatan di Asia, sehingga Tiongkok harus mampu untuk mengatasi konflik di wilayah Laut Natuna Utara untuk mengurangi pengaruh AS di wilayah Asia, karena AS memiliki banyak aliansi di Asia dan Asia Tenggara. AS merupakan sekutu dari beberapa negara di Asia Tenggara yang sudah mempunyai pangkalan militer di Filipina, ikut ambil bagian dengan ikut berpatroli di wilayah Laut Natuna Utara. AS berkepentingan untuk membendung ekspansi kekuatan Tiongkok di Asia Tenggara³.

Dalam perannya di sistem internasional, Tiongkok selalu menyampaikan pentingnya perdamaian. Tiongkok akan berusaha untuk menolak segala bentuk konfrontasi langsung. Tiongkok berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Tiongkok yang terus menerus meningkatkan kapabilitas militernya, tetap memiliki prinsip untuk menjaga situasi keamanan internasional tetap kondusif. Namun, Tiongkok tegas dalam segala bentuk sanksi ekonomi. Tiongkok melakukan diplomasi ekonomi untuk negara lain mau bekerja sama dan memiliki dependensi dengan Tiongkok. Dengan demikian, Tiongkok dapat memasukkan kepentingan politik negaranya. Hal ini merupakan politik ekonomi yang dilakukan Tiongkok.⁴

Hubungan Tiongkok dengan ASEAN sudah berlangsung sejak lama, dan semakin meningkat khususnya setelah krisis finansial Asia pada tahun 1997,

¹Sukawarsini, Djelantik, 2015, *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama dan Relasi Antarkawasan*, Jakarta: Obor Indonesia

² Sam Sholli, 28 Januari 2018, *China and Russia Threaten Japan After 'Enforcing' Claim to South China Sea with Military*, Express, tersedia di www.express.co.uk diakses pada 18 Oktober 2018

³Leszek Buszynski, 18 Januari 2017, *Why is the South China Sea so Important to the US*, The Conversation, tersedia di theconversation.com diakses pada 18 Oktober 2018

⁴ Ibid.

Tiongkok banyak menancapkan pengaruh yang kuat atas ASEAN melalui bantuan pemulihan ekonomi.⁵ Hubungan ekonomi Tiongkok dengan ASEAN juga semakin dikuatkan melalui *China – ASEAN Free Trade Area* (CAFTA). Selain melalui diplomasi ekonomi, Tiongkok juga memiliki kerjasama di bidang militer dengan negara-negara ASEAN, baik itu melalui penjualan senjata dan juga *joint military*.⁶ Selain dengan ASEAN secara organisasi, Tiongkok juga memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara ASEAN.

Klaim Tiongkok atas Laut Natuna Utara merupakan klaim yang samar dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Sesuai hukum UNCLOS, klaim berdasarkan sejarah tidak bisa dijadikan dasar pijakan untuk mengklaim wilayah perairan. Walau bentuk klaim Tiongkok melalui peta nine dash line terlihat mencakup semua wilayah Laut Natuna Utara, Tiongkok menyatakan bahwa klaimnya hanya untuk pulau-pulau di wilayah Laut Natuna Utara. Dengan mengklaim pulau-pulau, maka Tiongkok akan mampu mengklaim wilayah ZEE laut dari pulau yang diklaim. Namun, sesuai UNCLOS juga, ZEE hanya bisa diklaim dari pulau yang mampu menampung kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. Pulau didalam wilayah klaim Tiongkok tidak memiliki kriteria tersebut. Karena itu, Tiongkok berusaha untuk terus membangun pulau-pulau di wilayah Laut Natuna Utara. Dalam proses pembangunan inilah yang kerap terjadi perselisihan dengan negara pengklaim lain. Pembangunan yang dilakukan Tiongkok ditentang oleh negara pengklaim lainnya.

⁵ Jing-Dong Yuan, 2001, *China-ASEAN Relations Perspective, Prospects and Implications for US Interests*, United States: Strategic Studies Institute
⁶ Ibid.

ASEAN merupakan kunci bagi Tiongkok untuk mampu menguasai Laut Natuna Utara. Bila Tiongkok mampu membuat ASEAN menjadi bergantung pada Tiongkok agar mudah untuk memasukkan kepentingan Tiongkok, maka Tiongkok nantinya mampu menjadi kekuatan hegemoni atas Laut Natuna Utara dan bebas untuk mengeksploitasinya. Namun nyatanya, isu Laut Natuna Utara tidak hanya melibatkan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Ada kekuatan negara lain didalamnya. AS, Korea Selatan, Inggris, Jepang juga beberapa kali pernah mengintervensi wilayah di Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara merupakan wilayah penting bagi negara di Asia Pasifik. Laut Natuna Utara juga menjadi sangat penting bagi AS, karena selain perkiraan sumber daya alam yang melimpah, juga untuk mempertahankan pengaruh AS atas wilayah Asia Tenggara. Karena itu, negara-negara yang membutuhkan ASEAN akan senantiasa mendukung ASEAN dalam sengketa dengan Tiongkok. Jika Tiongkok mampu menguasai Laut Natuna Utara, maka pengaruh AS akan semakin kecil di Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan, karena Tiongkok akan menjadi kekuatan yang paling berpengaruh di regionalnya.

ASEAN memiliki posisi yang sangat penting karena telah menjadi pusat kebijakan luar negeri Tiongkok. Tidak hanya bagi Tiongkok, bagi negara-negara lain seperti AS, Jepang dan Australia juga menjadi penting karena merupakan negara penghasil sumber daya. ASEAN memegang peranan kunci untuk penyelesaian sengketa tersebut, karena jika ASEAN selalu menentang Tiongkok atas tindakannya di Laut Natuna Utara, maka pembangunan Tiongkok atas Laut Natuna Utara akan terhambat dan tentu sulit menjadi kekuatan hegemoni. Sejak dinyatakan tidak memiliki hak atas Laut Natuna Utara oleh arbitrase internasional,

Tiongkok berupaya meningkatkan hubungan kerjasama dengan ASEAN. Tujuannya adalah agar dependensi ASEAN terhadap Tiongkok semakin meningkat, seiring dengan peran Tiongkok yang semakin berpengaruh terhadap ASEAN. Dengan demikian, Tiongkok mampu memasukkan kepentingan Tiongkok atas Laut Natuna Utara. Tiongkok harus mampu mengurangi pengaruh dari negara lain yang bersaing atas ASEAN, seperti AS dan Jepang.⁷ Negara-negara ASEAN memanfaatkan kekuatan negara berpengaruh lainnya seperti AS, melalui *hedging strategy* untuk membendung ekspansi Tiongkok di Laut Natuna Utara.⁸ Karena itu, untuk menghindari pertentangan yang ada dan mampu menjadi kekuatan hegemoni di Laut Natuna Utara, maka Tiongkok harus memiliki strategi terhadap negara pengklaim yang notabene adalah negara ASEAN. Melalui penelitian ini, penulis ingin meneliti **‘Bagaimana Strategi Tiongkok terhadap ASEAN untuk Menjadi Kekuatan Hegemoni di Laut Natuna Utara?’**

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN TIONGKOK TERHADAP ASEAN

Dasar Kebijakan Tiongkok

Dasar kebijakan luar negeri Tiongkok saat ini adalah melalui ideologi Sosialisme khas Tiongkok atau *Socialism with China's Characteristics*. Ideologi ini diperkenalkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013. Prinsip-prinsip dari ideologi ini dikategorikan menjadi satu pedoman dasar, satu rancangan global, satu tujuan pembangunan. Satu pedoman dasar yang dimaksud adalah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pusat.

⁷Fenna Eggberink, 2010, ASEAN and Strategic Rivalry among the Great Powers in Asia, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 29, no.3

⁸ Vibhanshu Shekhar, 2012, ASEAN's Response to the Rise of China: Deploying a Hedging Strategy, SAGE Publications

Saat ini, yang menjadi kebijakan politik luar negeri utama Tiongkok adalah melalui *Belt and Road Initiative* (BRI). Tiongkok memiliki prinsip bahwa jika suatu negara ingin menjadi negara yang kaya, maka negara tersebut harus melakukan pembangunan infrastruktur jalur. Karena itu, Tiongkok giat mengeluarkan dana untuk membangun infrastruktur Jalur Sutera melalui strategi BRI. Jalur Sutera merupakan kebijakan Tiongkok untuk mengembalikan kejayaan Jalur Sutera Tiongkok pada masa lalu. Jalur Sutera adalah jalur perdagangan internasional pertama yang melalui jalur laut dalam sejarah Tiongkok. Sejak jaman Dinasti Tang sampai masa kolonialisme Eropa, sutera dan keramik Tiongkok melintasi jalur penting Laut Natuna Utara, yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara dan terus sampai India, Timur Tengah dan Eropa. Jalur perdagangan ini menjadikan Tiongkok sebagai negara maritim terkuat di dunia dan memfasilitasi perekonomian dinasti-dinasti Tiongkok. Jalur Sutera diharapkan dapat menyambungkan Tiongkok dengan banyak negara antar benua, melalui infrastruktur laut dan darat. Infrastruktur ini diharapkan dapat menyambung antara Asia, Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Sejak dicetuskannya BRI pada tahun 2013, Tiongkok membantu negara-negara miskin dan berkembang, dalam investasi pembangunan infrastruktur.

Superioritas Tiongkok dalam menjalankan kebijakan luar negeri ditunjukkan Tiongkok untuk menangkal adanya pertentangan dari negara lain, yang akan mengganggu kepentingan Tiongkok. Dapat diindikasikan bahwa tujuan jangka panjang Tiongkok melalui strategi yang dijalankan adalah untuk menjadi kekuatan global. Namun, untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut, Tiongkok harus memastikan strategi utama BRI sukses, dan pertama-tama dimulai dari negara regional ASEAN. ASEAN sebagai pintu utama

untuk menjalankan BRI karena merupakan negara yang secara geografis mendominasi kawasan Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara menjadi pintu utama untuk jalur BRI

Gambaran Umum Kebijakan Tiongkok terhadap ASEAN

Kebijakan umum Tiongkok terhadap negara-negara ASEAN adalah dengan membantu pembangunan negara-negara ASEAN melalui ekonomi, namun disaat yang bersamaan juga memunculkan tantangan tersendiri bagi ASEAN. Sesuai dengan dasar kebijakan Tiongkok, Tiongkok ingin meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain. Posisi Tiongkok saat ini sebagai kekuatan utama di wilayah Asia Pasifik, dimana Tiongkok mampu dengan bebas untuk memperluas aktivitas politik internasionalnya. Sesuai dengan dasar kebijakan Tiongkok, yang selalu ingin mengupayakan stabilitas dan kerjasama antar negara. Tiongkok berupaya untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan ASEAN secara komunitas dan juga secara bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN.

Sejak terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, politik internasional di Asia banyak yang mengarah ke Asia Tenggara. ASEAN telah menjadi pusat dari hubungan internasional di wilayah Asia. Bagi Tiongkok, Asia Tenggara merupakan wilayah yang menjadi tantangan untuk hubungan internasional, karena Asia Tenggara merupakan wilayah negara-negara yang berbeda, namun memiliki beberapa kesamaan sejarah dan budaya. Mayoritas dari organisasi internasional yang diikuti Tiongkok berada di wilayah Asia Pasifik, dengan konsentrasi di Asia Tenggara.

Tiongkok memiliki alasan khusus mengapa harus memiliki hubungan yang baik dengan ASEAN. Alasan pertama adalah karena jarak geografis, pengalaman historis, dan terutama untuk melindungi

kebutuhan sumber daya Tiongkok, yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Tiongkok sudah memiliki hubungan dengan ASEAN melalui perdagangan, kegiatan kemaritiman dan migrasi. Asia Tenggara menjadi wilayah yang memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar dan sejak lama telah menjadi eksportir minyak dan gas alam utama.⁹

Salah satu kebijakan utama Tiongkok terhadap ASEAN adalah melalui Jalur Sutra, yaitu jalur yang melewati wilayah Asia Tenggara, yang menjadi jalur bisnis di masa lalu oleh Tiongkok, dan sekarang sedang dimunculkan lagi oleh Tiongkok. Kebijakan Jalur Sutra ini nantinya akan menjadi strategi utama Tiongkok untuk menjadi kekuatan hegemoni di Laut Natuna Utara. Tiongkok senantiasa menjaga kestabilan wilayah Asia Tenggara demi menjaga keamanan pembangunan ekonomi domestic Tiongkok, dan telah menjadikan hubungan dengan Asia Tenggara sebagai hubungan yang spesial.

Tiongkok juga secara konsisten memiliki kebijakan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN. ASEAN adalah partner dagang terbesar ketiga bagi Tiongkok. sejak tahun 2002-2012, perdagangan Tiongkok – ASEAN meningkat sebanyak 23,6% setiap tahun, hingga bernilai US\$400 milyar, dan investasi mencapai lebih dari \$100 milyar pada akhir tahun 2012. Kedua pihak juga menargetkan akan meningkatkan perdagangan hingga satu trilyun dolar pada tahun 2020.¹⁰ Perdagangan Tiongkok dan ASEAN memang selalu konsisten meningkat. Perdagangan Tiongkok dan ASEAN meningkat dari \$192 milyar pada tahun 2008 hingga \$515

⁹Zhao Hong, 2012, *China and India: The Quest for Energy Resources in the twenty-first century*, New York: Routledge

¹⁰Ibid.

milyar pada tahun 2018.¹¹ Kebijakan ini dilakukan Tiongkok untuk memperkokoh hubungan dengan ASEAN, sehingga Tiongkok nantinya akan lebih mudah untuk memasukkan kepentingan Tiongkok kepada ASEAN.

Terkait Laut Natuna Utara, Tiongkok senantiasa mendukung adanya pengelolaan bersama atas Laut Natuna Utara. Salah satunya adalah dengan menyetujui adanya CoC, yaitu norma-norma yang diajukan ASEAN menjadi pedoman bagi setiap negara di wilayah Laut Natuna Utara, untuk mengelola Laut Natuna Utara bersama. Kebijakan ini merupakan salah satu cara Tiongkok untuk bisa mendekat kepada ASEAN

Dalam rangka untuk memperkuat dan melancarkan tujuan Tiongkok membangun Jalur Sutera abad 21, Tiongkok berupaya untuk mendekat kepada ASEAN. Pada Oktober 2013, Tiongkok mengajukan proposal pembentukan hubungan dekat antara Tiongkok dengan ASEAN, dan menawarkan gagasan pembentukan Jalur Sutera Maritim abad 21 untuk mempromosikan kerja sama maritime. Jalur Sutra ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara, dimana ditekankan bahwa tujuannya adalah untuk keamanan perdagangan maritime.

ASEAN menjadi penting bagi Tiongkok, karena beberapa negara anggota ASEAN merupakan negara yang bersengketa dengan Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara. Jika Tiongkok tidak mampu memiliki hubungan yang baik dengan ASEAN, maka visi Jalur Sutra abad 21 Tiongkok akan terhambat. Akan sulit bagi Tiongkok untuk melakukan pembangunan di wilayah Laut Natuna Utara, karena negara anggota ASEAN

¹¹Rajiv Biswas, 2018, ASEAN-China Trade Boosting Growth tersedia <http://global.chinadaily.com.cn/a/201811/19/WS5bf1f6a6a310eff303289619.html>

lainnya, yang menjadi negara pengklaim, akan menentanginya. Karena itu, Tiongkok harus mampu membangun hubungan yang baik dengan ASEAN, dan membuat negara-negara pengklaim dari ASEAN bergantung kepada Tiongkok, agar rencana pembangunan Tiongkok lancar. Asia Tenggara menjadi wilayah yang paling menjanjikan bagi BRI karena wilayah ini merupakan pembentukan Jalur Sutera Maritim Abad 21 akan melewati wilayah Asia Tenggara. Selain itu, *China – Indochina Corridor for International Economic Cooperation* adalah satu dari enam jalur utama yang akan dibangun dibawah proyek Jalur Sutera Maritim abad 21 tersebut.¹²

ARTI PENTING LAUT NATUNA UTARA

Laut Tiongkok Selatan menyimpan perikanan yang menggiurkan, cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat AS setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan mungkin merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Tiongkok mengklaim lebih dari 95% Laut Natuna Utara dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85% impor minyak mentah Tiongkok. China juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut Natuna Utara dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom.¹³

Kepentingan Tiongkok di Laut Natuna Utara

¹²Xue Li, Li Yongke, 2017, The Belt and Road Initiative and China's Southeast Asia Diplomacy, The Diplomat, tersedia di www.thediplomat.com diakses pada 27 Oktober 2018

¹³Pete Cobus, 2017, Konflik dan Diplomasi di Laut China Selatan, VOA News tersedia di : <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/> diakses pada 04 April 2019

Seperti yang diketahui, Tiongkok menginginkan penguasaan atas Laut Natuna Utara karena potensinya yang sangat besar. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tiongkok, diperkirakan kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spratly mencapai 17,7 milyar ton.¹⁴ Wilayah Laut Natuna Utara juga merupakan jalur perdagangan yang sangat penting. Sebanyak dua pertiga kegiatan ekspor minyak dan gas alam cair dunia menuju Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, harus melewati jalur ini.¹⁵

Tiongkok mengimpor rata-rata 9,61 juta barel minyak per hari.¹⁶ Karena itu, Tiongkok menjadi lebih terbuka dan mendukung adanya kerjasama antar negara. Tiongkok harus memangkas biaya impor demi kebutuhan nasional Tiongkok. Karena Tiongkok banyak bergantung kepada negara lain untuk impor komoditas kebutuhan rakyat Tiongkok. Presiden Xi Jinping menyatakan akan membuka investasi asing yang lebih luas di Tiongkok. Konsumsi minyak Tiongkok semakin hari semakin meningkat. Sejak tahun 2006, Tiongkok menjadi negara konsumen minyak terbesar di dunia. Karena itu, Tiongkok membutuhkan sumber daya untuk mencukupi kebutuhan cadangan minyak Tiongkok. Melimpahnya cadangan sumber daya minyak di Laut Natuna Utara, menjadi alasan mengapa wilayah Laut Natuna Utara menjadi sangat penting. Pada tahun 1968 ditemukan cadangan minyak bumi yang menaikkan nilai Laut Natuna Utara secara dramatis. Cadangan minyak

potensial di kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan sampai 105 milyar barel dan di seluruh Laut Natuna Utara sebanyak 213 milyar barel.¹⁷ Walaupun belum bisa dibuktikan, namun perkiraan itu sudah menjadikan wilayah Laut Natuna Utara sebagai wilayah yang cukup menarik untuk dikuasai.

Selain dari sector migas, sumber daya perikanan di Laut Tiongkok Selatan juga berlimpah. Sejak tahun 2006, para nelayan di provinsi Guangdong, provinsi yang terdekat dengan Laut Natuna Utara, banyak mendapat ikat di wilayah *offshore* Laut Natuna Utara. Hal ini dikarenakan, menyediakan ikan di wilayah laut pantai Tiongkok, semakin menipis. Dari yang berkisar sekitar 94% pada tahun 1988, menurun menjadi hanya 64% di tahun 2002.¹⁸

Disamping segala potensi yang cukup menjanjikan di wilayah perairan Laut Natuna Utara, wilayah Tiongkok bersifat continental, dimana 50% wilayah di bagian Barat dan Utara adalah dataran tinggi. Kondisi ini menyebabkan hamper setengah wilayah Tiongkok merupakan medan yang sulit sehingga cenderung sepi dari peradaban manusia.¹⁹ Karena itu, Tiongkok lebih banyak memfokuskan pertahanan melalui wilayah laut, sesuai dengan agenda utama pemerintah Tiongkok saat ini, ingin menjadikan Tiongkok sebagai negara maritime terkuat, secara khusus di wilayah Timur dan Selatan.

Selain alasan sumber daya alam yang melimpah dan jalur pelayaran strategis, keinginan untuk mengontrol Laut Natuna Utara juga karena keinginan untuk memperluas ekspansi kekuasaan. Tiongkok memiliki keinginan untuk mengembangkan ekspansi kekuasaan

¹⁴Military Analysis, <https://militaryanalysisonline.com> pada 08-01-2018

¹⁵ Simela Victor Muhammad, 2012, Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut Natuna Utara, Jurnal HI, Vol. IV No. 08/II/P3DI/April

¹⁶Irina Slav, 2018, "China's Oil Imports Surge to Record High", Oil Price, tersedia di <https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Chinas-Oil-Imports-Surge-To-Record-High.html> diakses pada 12 November 2018

¹⁷Ibid

¹⁸Bill Hayton, 2014, *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*, London: Yale University Press (hal 241)

¹⁹Op.cit

hingga ke seluruh Asia bahkan Eropa. Jalur Sutera yang digagas Tiongkok merupakan jalur yang melewati Laut Natuna Utara, dengan tujuan akhir bisa sampai ke Eropa. Jalur Sutera yang mengarah hingga ke seluruh Asia ini, nantinya diharapkan dapat melewati Teluk Kra di Thailand dan Selat Malaka di wilayah Indonesia. Jalur ini akan memakan waktu yang lebih singkat dan tentu biaya yang lebih sedikit. Negara-negara tentu akan memilih jalur ini untuk ekspor dan impor. Karena itu, jika Tiongkok benar mampu mengontrol segala kegiatan di Laut Natuna Utara secara keseluruhan, maka berarti jalur perdagangan maritime akan dipegang oleh Tiongkok. Hal ini juga memang cukup beralasan karena Tiongkok sendiri yang menyatakan keinginannya untuk menjadi negara maritime terkuat di dunia, melalui Buku Putih Strategi Militer pada tahun 2015. Hal ini semakin memperjelas alasan mengapa Laut Natuna Utara sangat penting bagi Tiongkok.

Posisi ASEAN di Laut Natuna Utara dan Kepentingan Tiongkok atas ASEAN terkait Laut Natuna Utara

Kebutuhan Tiongkok akan sumber daya energi, khususnya minyak sudah tidak diragukan lagi. Hampir 80% impor energi, dan 85% barang impor yang menuju Tiongkok, dikirimkan melalui Selat Malaka. Seperti yang diketahui, Selat Malaka sendiri dikelola oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia, yang merupakan anggota-anggota ASEAN. Tiongkok perlu cari cara untuk menghemat pembiayaan Tiongkok sendiri. Beberapa alternative lain yang digunakan Tiongkok adalah melalui akses lain untuk mencapai ke Teluk Bengal dan Lautan Hindia dengan memotong jalur Selat Malaka.²⁰ Hal ini mendasari Tiongkok

untuk mengupayakan diplomasi untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Myanmar, selaku gerbang menuju Teluk Bengal dan Lautan Hindia. Selain alternatif melalui Myanmar, Tiongkok juga mengupayakan jalur lain melalui Thailand. Pemerintah Tiongkok telah berinvestasi di kanal Kra, Thailand, yang akan memotong jalur melalui Thailand Selatan, untuk menghemat 48 jam waktu pengapalan melewati jalur transit antara Asia dan Eropa.²¹ Jalur ini pada akhirnya akan melewati Laut Natuna Utara.

Karena salah satu kebutuhan terbesar Tiongkok di bidang energy tersebut, maka Tiongkok harus mampu memiliki strategi khusus atas negara-negara Asia Tenggara, baik itu secara bilateral, ataupun melalui komunitas ASEAN. Asia Tenggara memiliki peranan besar bagi negara-negara Asia Pasifik untuk jalur pelayaran ekspor impor melalui Selat Malaka, dan juga AS untuk mempertahankan kekuatan hegemoni. Khususnya pada Selat Malaka, Tiongkok berkepentingan untuk mengurangi ketergantungan pada transportasi laut untuk impor menuju Tiongkok, membangun jaringan transportasi darat (jalan raya, jalur kereta api, dan pipa gas), untuk mensuplai energy. Keseluruhan jalur yang akan dibangun ini tentunya akan melalui Laut Natuna Utara.

ASEAN memegang peranan yang sangat penting dalam isu Laut Natuna Utara. Tidak hanya bagi Tiongkok, namun bagi negara-negara yang mempunyai kepentingan di Asia. Tiongkok perlu untuk mendekat kepada ASEAN untuk mengurangi pengaruh kekuatan AS yang cukup sering melakukan intervensi atas Laut Natuna Utara. Mengapa ASEAN dan AS berhubungan erat? Karena beberapa negara telah terlibat kemitraan dengan AS. Malaysia sejak 2014 sudah memiliki kemitraan strategis dengan AS dalam *Comprehensive Partnership*. Singapura

²⁰Indriana Kartini, 2015. Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya bagi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Wilayah*. vol. 6 no. 2. 2015

²¹Ibid.

juga telah memiliki kemitraan strategis dalam *Strategic Framework Agreement* sejak tahun 2005. Thailand dan Filipina sudah menjadi sekutu AS sejak 2003, dan Filipina menjadi sekutu dengan status major non-NATO ally. Indonesia memiliki kemitraan strategis dalam *Defense Framework Agreement* (DFA) dan *Comprehensive Partnership Agreement* (CPA) sejak 2010.

Wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah perebutan kekuasaan oleh negara-negara besar di dunia. Sejak tahun 2007, Jepang mencetuskan *Confluence of the Two Seas*, yang pertama kali mengenalkan istilah Indo-Pasifik, yang merupakan wilayah laut Samudera Hindia dan Samudera Pasifik bagian barat dan tengah serta perairan Indonesia yang menghubungkan dua samudera tersebut. Lalu di bulan 2011, AS pada masa pemerintahan Obama mengumumkan kebijakan *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing towards Asia*. Kebijakan AS ini merupakan upaya AS untuk mengatasi kekuatan Tiongkok yang meningkat secara konsisten. Kebijakan ini memprioritaskan kawasan Asia Pasifik dalam perencanaan militer AS, kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi. Jepang memiliki hubungan yang erat dengan Asia Tenggara karena Asia Tenggara merupakan sumber bahan baku dan energy bagi Jepang. Bahkan, LNG yang diekspor oleh Indonesia, sebanyak 70% dijual ke Jepang.²² Karena itu, Jepang tentunya akan berusaha agar Asia Tenggara tidak sampai didominasi oleh Tiongkok.

Laut Natuna Utara merupakan tempat konstelasi politik di regional Asia. Hak kedaulatan yang diperoleh atas wilayah Laut Natuna Utara akan memberikan keuntungan yang besar bagi negara yang memilikinya, untuk mengeksploitasi minyak, gas dan sumber daya perikanan. Lebih dari 80% ekspor minyak menuju Jepang, Korea Selatan dan

Taiwan melewati jalur Laut Natuna Utara.²³ Tiongkok tentunya akan berkuasa atas ketiga negara tersebut jika berhasil mendominasi Laut Natuna Utara. Maka, prediksi jika Tiongkok akan menjadi kekuatan hegemoni di Asia Pasifik juga mungkin bisa terjadi. Jika ditilik dari perspektif neorealis dan realis secara umumnya, Tiongkok diperkirakan akan terus meningkatkan power untuk meningkatkan legitimasi atas Laut Natuna Utara, sehingga ASEAN semakin berkurang hak nya atas Laut Natuna Utara.

Melihat posisi ASEAN yang begitu penting, tentu negara lain akan selalu berusaha untuk *memback-up* dan mendukung ASEAN dalam isu Laut Natuna Utara. Hal ini akan menghalangi visi Tiongkok, karena tentu pembangunan yang direncanakan Tiongkok akan ditentang. Apalagi jika militer-militer negara bergabung untuk nantinya menentang Tiongkok. Karena itu, perlu strategi khusus terhadap ASEAN agar mau sejalan dengan kepentingan Tiongkok sendiri.

STRATEGI TIONGKOK UNTUK MENJADI KEKUATAN HEGEMONI DI LAUT NATUNA UTARA

Strategi yang dijalankan merupakan strategi domestik Tiongkok dan secara khusus juga strategi untuk lingkup komunitas ASEAN secara organisasi dan juga bilateral dengan negara anggota ASEAN. Karena strategi yang dilakukan terhadap salah satu negara ASEAN, mampu mempengaruhi organisasi ASEAN. Strategi yang dijalankan disini tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan Tiongkok atas Laut Natuna Utara. Tujuannya adalah untuk dapat menjadi kekuatan paling berpengaruh atau kekuatan hegemoni yang mampu mengontrol seluruh kegiatan di wilayah Laut Natuna Utara. Strategi

²²Op.Cit

²³Ibid.

yang dilakukan Tiongkok meliputi militer, politik dan ekonomi.

Strategi Militer

Strategi dan doktrin utama militer Tiongkok dalam membangun angkatan yang kuat dan efektif, untuk dapat memenangkan konflik regional, salah satunya berbentuk jaringan kontrol yang saling berintegrasi di badan militer Tiongkok. Dalam Buku Putih Kebijakan Keamanan Tiongkok, keamanan maritim merupakan hal yang diutamakan Tiongkok saat ini. Visi Tiongkok dalam militer adalah untuk menjadikan militer Tiongkok, yang merupakan militer terbesar dunia, menjadi militer dengan kekuatan kelas dunia. Tiongkok menargetkan pada tahun 2035, modernisasi militer akan disempurnakan dan menjadi militer kelas dunia.²⁴ Strategi ini sejalan juga dengan visi jangka panjang Tiongkok, yang ingin mengembalikan kejayaan Jalur Sutera Maritim abad 21. Untuk mengembalikan kejayaan Jalur Sutera, dimana Tiongkok mau menjadi negara yang mengontrol wilayah Jalur Sutera yang melintasi Laut Natuna Utara, tentu dibutuhkan kekuatan militer maritime yang kuat.

Konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara tidak hanya melibatkan militer Tiongkok atau negara-negara pengklaim. Militer dari luar wilayah regional Laut Natuna Utara juga beberapa kali terlibat di Laut Natuna Utara. Militer AS terutama. Militer AS beberapa kali melakukan patroli di sekitar wilayah Laut Natuna Utara. Dari segi kapabilitas, militer Tiongkok masih dibawah kapabilitas militer AS. Sementara, negara-negara pengklaim dari ASEAN, beberapa memiliki hubungan militer dengan AS.

²⁴Wang Lei, 2017, China in 2017: Building World Class Military Forces, China Global Television Network, tersedia di https://news.cgtn.com/news/796b6a4e33637a6333566d54/share_p.html diakses pada 21 November 2018

Menyadari hal tersebut, Tiongkok harus mampu meningkatkan kemampuan militernya juga. Tiongkok harus menerapkan strategi untuk tetap melakukan *deterrence* kepada negara lain. Karena jika tidak, usaha Tiongkok untuk mendapat penundukan dari negara ASEAN tidak akan berhasil, karena ada hubungan militer dengan AS, ASEAN masih merasa aman. Tiongkok harus mampu menjadi negara dengan kekuatan militer yang mengimbangi AS. Hal ini juga tercantum secara jelas dalam Buku Putih Strategi Militer Tiongkok, yaitu “.....to maintain strategic deterrence and carry out nuclear counterattack”. Nuklir masih menjadi kekuatan andalan setiap negara untuk melakukan *deterrence*.

Peningkatan Kapabilitas Militer

Sejak tahun 2017, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok memfokuskan peningkatan kemampuan angkatan militer Tiongkok. Peningkatan kemampuan angkatan militer ditandai dengan latihan militer skala besar, melatih militer untuk situasi konfrontasi, latihan militer jarak jauh dan peningkatan strategi pertahanan. Tiongkok sudah mampu untuk memproduksi persenjataan militernya sendiri. Sejak 2013, beberapa persenjataan militer yang sudah mampu diproduksi oleh Tiongkok sendiri antara lain²⁵ :

1. Rudal balistik DF-31A jarak jauh.
Rudal ini memiliki daya jangkau 11.200 km, yang jika ditempatkan di pesisir Tiongkok, maka akan mampu sampai menuju Indonesia
2. Pesawat tempur generasi 5: J-20 dan J-31.
Pesawat ini mulai beroperasi pada tahun 2016. Kedua pesawat ini mirip dan memiliki kemampuan yang sama dengan buatan AS.
3. Pesawat pembom generasi 5: H-20.

²⁵Yani, Yanyan Mochamad Yani.2017. Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pesawat ini merupakan salinan dari pesawat pembom AS bertipe B-2. Pesawat ini diharapkan akan mampu terbang sejauh 8.000 km tanpa pengisian bahan bakar dan dapat membawa muatan lebih dari 10 ton rudal udara ke darat. Sebelum Tiongkok, masih hanya AS yang mampu memproduksi pesawat jenis ini. Hal ini menandakan kemampuan Tiongkok yang semakin meningkat dalam kapabilitas militer.

4. Kapal selam bertenaga nuklir tipe 094.

Kapal selam ini memiliki daya tangkal yang efektif atas armada kapal induk negara manapun. Tidak banyak negara yang memiliki kapal selam yang mumpuni. Kapal selam ini dapat beroperasi memasuki perairan ZEE tanpa terpantau, karena hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu mendeteksi kapal selam. Dengan kemampuan kapal selam yang hebat, Tiongkok bisa dengan lancer mengeksplor wilayah Laut Natuna Utara hingga ke batas negara pengklaim lainnya.

5. Mengembangkan detektor kapal selam jarak jauh pertama di dunia.

Walau detector ini masih dikembangkan, namun Tiongkok sudah menunjukkan pencapaian yang hebat dalam menciptakan alat yang baru pertama sekali ada di dunia ini. Detektor kapal selam sudah digunakan sejak jaman Perang Dunia kedua. Alat yang digunakan untuk mendeteksi adalah magnetometer, namun magnetometer yang masih ada saat ini hanya mampu mendeteksi kapal selam dengan jarak yang dekat. Tiongkok tengah mengembangkan magnetometer, dengan *superconduction quantum interference device* (SQUID) yang mampu mendeteksi kapal selam dari jarak yang lebih jauh, melalui getaran bumi.²⁶ Jika Tiongkok

mampu menyempurnakan detector ini, maka Tiongkok akan menjadi negara satu-satunya yang mampu mendeteksi adanya kapal selam yang mendekat, terutama di wilayah Laut Natuna Utara.

6. Proyek *Underwater Great Wall* Tiongkok.

Proyek ini merupakan proyek pembangunan jaringan hubung antara kapal angkatan laut Tiongkok dengan sensor bawah laut Tiongkok, termasuk didalamnya detector kapal selam. Proyek ini bertujuan untuk memudahkan Tiongkok mengontrol laut melalui 'paket lengkap', yaitu control oleh kapal di permukaan laut, mengontrol kapal selam yang mendekat, bahkan akvitas udara di wilayah laut.²⁷ Selain untuk mengontrol negara lain, proyek ini juga mampu memonitor sumber daya laut dan bahkan bencana. Dengan proyek dengan paket lengkap ini, Tiongkok tentu akan mampu mendominasi dan mengontrol Laut Natuna Utara. Proyek ini mirip dengan proyek AS pada masa Perang Dingin, yaitu *Sound Surveillance System*

Reformasi dan Modernisasi Badan Militer Tiongkok

Pada tahun 2016, Tiongkok membentuk lima Perintah Operasi di dalam Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Lima operasi ini merupakan penyusutan dari tujuh wilayah operasi militer. Penyusutan operasi ini bertujuan agar target operasi militer Tiongkok lebih terarah. Selain itu, para pimpinan dari lima Perintah Operasi ini dinaungi oleh Komisi Militer Sentral (KMS) dari Partai Komunis Tiongkok, sehingga meningkatkan control dari pemerintah atas operasi militer. Pertahanan militer merupakan focus dari pemerintahan Tiongkok. Penyusutan operasi ini juga

²⁶David Hambling, 2017, China's Quantum Submarine detector could seal South China Sea, New Scientist, tersedia di : <https://www.newscientist.com/article/2144721-chinas-quantum-submarine-detector-could-seal-south-china-sea/> diakses pada 02 April 2019

²⁷Sarosh Bana, 2018, China's Underwater Great Wall, The Washington Times, tersedia di <https://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/30/chinas-underwater-great-wall/> diakses pada 03 Maret 2019

merupakan strategi militer dari Pemerintah Tiongkok, untuk memastikan bahwa militer Tiongkok stabil dan terarah.

Kelima Perintah Operasi tersebut adalah Operasi Timur, Operasi Selatan, Operasi Barat, Operasi Utara dan Operasi Sentral. Operasi ini bertujuan untuk mengontrol dan memantau situasi di tiap wilayah operasi. Hasil dari pantauan dari tiap-tiap operasi akan dikoordinasikan dengan Tentara Pembebasan Rakyat untuk menindaklanjuti, seperti misalnya kepada Korea Utara, India, dan Laut Natuna Utara. Dalam operasi ini, Tentara Pembebasan Rakyat membentuk satgas gabungan bernama *Joint Operations Command Center* (JOCC). Satgas ini merupakan gabungan dari angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat dan juga angkatan roket special Tiongkok. Laut Natuna Utara masuk kedalam perintah operasi selatan. Perintah operasi yang semakin detail akan memungkinkan Tiongkok untuk semakin meningkatkan pengawasan terhadap Laut Natuna Utara. Dengan pengawasan penuh terhadap Laut Natuna Utara, akan memudahkan Tiongkok untuk mendominasinya.

Modernisasi militer merupakan prioritas Tiongkok. Tiongkok baru saja pada tahun 2019 ini meningkatkan anggaran belanja Tiongkok hingga US\$175.98 milyar.²⁸ Anggaran ini meningkat sebanyak 7,5% dari tahun 2018. Modernisasi struktur dan integrasi organisasi dalam angkatan Tiongkok ini merupakan salah satu strategi untuk menguatkan militer. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan angkatan yang kuat untuk melindungi wilayah Laut Natuna Utara.

Latihan Militer dan Peningkatan Presence Militer

Pada tahun 2017, Tiongkok pernah melaksanakan latihan gabungan antara badan operasi Timur dengan Selatan.

²⁸Liu Zhen, 2019, SCMP, Two Sessions 2019, tersedia di www.scmp.com/week-asia

Sebagaimana diketahui, Laut Natuna Utara merupakan wilayah kerja operasi Selatan. Dalam latihan gabungan itu, angkatan laut dan angkatan udara turut serta. Angkatan laut akan menerima informasi dari angkatan udara mengenai target-target operasi.

Dalam 11th ASEAN *Defense Ministerial Meetings* (ADMM), ASEAN dan Tiongkok telah sepakat untuk mengimplementasikan *Code of Conduct Single Draft Negotiating Text*. Dalam pertemuan ADMM tersebut, ASEAN dan Tiongkok sepakat untuk mengadakan latihan militer maritim bersama. Di samping latihan militer sendiri, Tiongkok juga menggagas latihan militer bersama dengan ASEAN. Latihan gabungan maritime ini sudah terselenggara pada tahun 2018, dan akan mengadakan untuk yang kedua kali pada April 2019. Tiongkok menggagas latihan gabungan militer dengan ASEAN dengan syarat tidak boleh ada satu pun pihak di luar ASEAN dan Tiongkok yang turut serta dalamnya. Hal ini menandakan usaha Tiongkok untuk menunjukkan dominasi dan eksistensi kekuatan militer Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara.

Selain latihan militer, Tiongkok menggelar parade Angkatan Laut Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara. Pada tahun 2018, Tiongkok menyelenggarakan parade Angkatan Laut terbesar. Parade ini terdiri dari 48 kapal besar dan 76 jet tempur, termasuk Liaoning *aircraft carrier*, pesawat jet J-15 dan kapal selam nuklir dengan lebih dari 10.000 personel angkatan.²⁹ Parade ini tentu mampu menimbulkan efek *deterrence* terhadap ASEAN yang belum memiliki teknologi serupa. Parade ini juga untuk menyaingi kehadiran militer AS di Asia Tenggara, dimana AS menempatkan empat kapal perang canggih Angkatan Laut AS di perairan Singapura.

²⁹Li Jiayao, 2019, China Military, China to Hold Naval Parade on April 23 in Qingdao, tersedia di eng.chinamail.com.cn diakses pada 25 Maret 2019

Dari peningkatan kapabilitas militer, penunjukkan eksistensi kekuatan militer, hingga sampai reformasi struktur dalam militer, khususnya angkatan laut, menunjukkan keseriusan Tiongkok untuk menjadi kekuatan hegemoni di Laut Natuna Utara. Militer merupakan kunci utama untuk menjaga Laut Natuna Utara. Dengan kemampuan dan teknologi lebih tinggi dari negara pengklaim lainnya, akan semakin mempersulit negara lain untuk mengeksplorasi Laut Natuna Utara. Jika semakin sedikit yang mengeksplorasi Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok nantinya akan mampu menjadi satu-satunya negara yang mengatur di Laut Natuna Utara, dan hal ini berarti hegemoni.

Strategi Politik

Salah satu contoh nyata keberhasilan diplomasi Tiongkok atas ASEAN adalah melalui diplomasi dengan Kamboja pada tahun 2016. Pada saat itu, Kamboja yang menjadi *Chairman* ASEAN, menolak memasukkan masalah *Scarborough Reef* yang merupakan wilayah sengketa di Laut Natuna Utara pada komunikasi KTT ASEAN. Hal ini menyebabkan untuk pertama kalinya *joint communiqué* antar ASEAN menjadi gagal kedalam pertemuan ASEAN. Dua bulan sebelum pertemuan, Kamboja ternyata mendapat bantuan dana yang sangat besar dari Tiongkok, dan banyak yang menilai bahwa Kamboja mendapat tekanan yang besar. Hal ini menunjukkan betapa politik bilateral yang dilakukan Tiongkok dengan salah satu negara ASEAN, dapat mempengaruhi putusan ASEAN secara organisasi.

Sejak awal, dalam proses pembentukan COC, Tiongkok menentang adanya keterikatan hukum. Tiongkok juga menentang mekanisme regional dalam penyelesaian klaim, seperti penyelesaian lewat arbitrase atau pengadilan internasional. Tiongkok lebih memilih upaya penyelesaian secara bilateral. Disinilah Tiongkok menjalankan politiknya.

Tiongkok mengetahui bahwa Tiongkok tidak akan menang jika mengikuti jalur hukum yang sesuai, karena Tiongkok tidak memiliki hak atas wilayah Laut Natuna Utara. Tiongkok sadar bahwa jika ingin berpengaruh di ASEAN, Tiongkok pertama-tama harus menguatkan hubungan bilateral dengan masing-masing negara ASEAN. Setiap negara, sesuai dengan perspektif neorealis, pasti akan mengedepankan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu. Negara-negara, yang sudah mendapat banyak bantuan yang menguntungkan dari Tiongkok, tentu akan mengutamakan hubungan dengan Tiongkok, bahkan daripada wadah organisasinya sendiri.

Dalam pasal 33 dalam Piagam PBB menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan perdamaian, negara anggota bisa menggunakan negosiasi, penyelidikan, meditasi, rekonsiliasi, arbitrase, pengadilan hukum, menggunakan penyelesaian melalui organisasi regional, dan metode penyelesaian damai dengan cara damai lainnya. Tiongkok memilih untuk menggunakan cara terakhir dalam penyelesaian Laut Natuna Utara, walaupun Tiongkok memiliki perwakilan hakim di *International Court of Justice* atau *International Tribunal for the Law of the Sea*. Hal ini menandakan bahwa Tiongkok lebih memilih pendekatan diplomasi dengan ASEAN.

Strategi Ekonomi

Dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, Tiongkok mudah untuk membuat proyek dan memberikan dana yang cukup besar untuk negara lain, sehingga dengan demikian, Tiongkok menjadi tonggak yang mampu membantu banyak negara, dan akhirnya memiliki ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok. Ekonomi merupakan roda yang menggerakkan suatu negara, karena segala sesuatu pasti membutuhkan dana. Karena itu, Tiongkok memanfaatkan kekuatan

ekonominya sebagai strategi terhadap ASEAN, yang kekuatan ekonominya masih di bawah Tiongkok. Pertumbuhan GDP Tiongkok sendiri masih lebih tinggi daripada ASEAN secara keseluruhan. Dari tahun 2006-2015, pertumbuhan GDP Tiongkok sebesar 149%, sedangkan ASEAN sebesar 66%.³⁰ Strategi ekonomi menjadi krusial bagi Tiongkok, karena dengan ekonomi, Tiongkok mampu membuat ASEAN memiliki ketergantungan dengan Tiongkok, karena bantuan-bantuan dana yang besar, yang memberi keuntungan yang besar bagi ASEAN.

Jalur Sutra

Konsep Jalur Sutra bukanlah hanya sekedar konsep yang dibicarakan semata, melainkan sudah disebutkan dalam sebuah dokumen terbuka setelah sidang pleno ke-3 dari Komisi Sentral ke-18 PKT, pada November 2013 di Beijing. Selama setahun lebih, Tiongkok mengeluarkan rencana aksi yang komprehensif, didukung oleh 60 negara Eurasia dan Non Eurasia. Jaringan ekonomi yang diajukan mencakup wilayah geografis yang sangat luas. Jalur darat akan melewati benua Asia, Eropa dan Afrika, menghubungkan Tiongkok, Asia Tengah, Rusia dan Eropa di utara, dan menghubungkan Tiongkok dengan Teluk Persia dan Laut Mediterania melalui Asia Tengah dan Lautan Hindia di Selatan. Sementara itu, jalur laut diawali dari Pantai Tiongkok ke Eropa melalui Laut Natuna Utara dan Lautan Hindia, dan rute lainnya melalui pantai Tiongkok ke Pasifik Selatan.³¹

Bantuan Ekonomi, Investasi dan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi

³⁰ASEAN's Economy, 2017, US-ASEAN Business Council tersedia di <https://www.usasean.org/why-asean/asean-economy>

³¹Indriana Kartini, 2015, Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya bagi Amerika Serikat, *Jurnal Kajian Wilayah*, vol. 6 no. 2 2015

Bilateral dengan Negara Anggota ASEAN

Strategi politik dan ekonomi tidak hanya dijalankan Tiongkok dengan ASEAN sebagai komunitas, namun juga ke pada tiap-tiap negara anggotanya secara bilateral. Hal ini dijalankan Tiongkok untuk menggali dukungan lebih banyak, pertama-tama secara bilateral, untuk selanjutnya sehingga tiap-tiap negara ASEAN memiliki dependensi terhadap Tiongkok. Dengan bantuan ekonomi yang diberikan, diharapkan Tiongkok mampu untuk mempengaruhi keputusan ASEAN secara keseluruhan. Strategi ini sudah pernah terbukti berhasil dari kasus Kamboja, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Oleh sebab itu, Tiongkok terus memberikan bantuan ekonomi demi kepentingan Tiongkok sendiri.

KESIMPULAN

Ciri utama dari berhasilnya suatu negara mengontrol dan mendominasi sesuatu adalah, adanya penundukan dari negara lain. Dengan strategi ekonomi yang dijalankan Tiongkok, control Tiongkok atas Laut Tiongkok sudah dapat terlihat. Tiongkok pernah mengancam perusahaan-perusahaan minyak yang bekerja sama dengan Vietnam untuk pembangunan industri petrolium di wilayah lepas pantai Laut Natuna Utara. Tiongkok mengancam bahwa bisnis perusahaan-perusahaan tersebut akan dirugikan.³² Tiongkok mampu melakukan ini, karena Tiongkok memang memiliki kekuatan ekonomi yang dapat merugikan investor-investor jika tidak tunduk pada Tiongkok. Hal itu terbukti, Vietnam tidak jadi membangun industri petrolium yang akan mengeksplor minyak di wilayah lepas pantai Laut Natuna Utara tersebut. Selain itu, bahkan Filipina yang merupakan sekutu AS, akhirnya tunduk

³²BBC News, 2018, South China Sea: Vietnam 'Scraps New Oil Project', tersedia di www.bbc.com

pada kemauan Tiongkok karena kekuatan ekonomi yang dimiliki Tiongkok. Dengan bantuan ekonomi yang besar dari Tiongkok, Filipina yang awalnya selalu menolak reklamasi yang dilakukan Tiongkok di wilayah Kepulauan Spratly, akhirnya malah menyetujui reklamasi besar-besaran yang dilakukan oleh Tiongkok, dengan alasan hal tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama ekonomi dengan Tiongkok. Hal ini disebabkan karena diplomasi ekonomi yang berhasil dijalankan Tiongkok.

Walau Tiongkok memang belum mampu mendominasi Laut Natuna Utara secara menyeluruh, namun pelan-pelan Tiongkok sudah semakin menunjukkan superioritasnya. Tiongkok sadar bahwa masih ada kekuatan negara lain yang nantinya akan mengancam posisi Tiongkok di Laut Natuna Utara. Beberapa contohnya ada AS, Jepang bahkan Rusia. Negara-negara ASEAN lain pun belum semuanya mampu mengikuti kepentingan Tiongkok. Karena itu, Tiongkok harus terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan dependensi negara-negara di regional Laut Natuna Utara, agar Tiongkok dapat mempertahankan posisinya di Laut Natuna Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Burgess, J. Peter. 2003. The Politics of the SCS: Territoriality and International Law. *SAGE Journal*. Vol. 34 No.1
- Buszynski, Leszek. 2003. ASEAN, the DOC, and the South China Sea, *Journal of Contemporary Southeast Asia*. Vol. 25 No.3
- Chan, Gerald. 2015. China Eyes ASEAN: Evolving Multilateralism. *Journal of Asian Security*. Vol.2 No. 1
- Eggberink, Fenna. 2010. ASEAN and Strategic Rivalry among the Great Powers in Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Vol. 29. no.3
- Farhana, Faudzan. 2014. Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.11 No.1
- Fravel, Taylor. 2011. China's Strategy in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia Journal*. Vol. 33 No. 3
- Han, David Guo Xiong. 2017. China's Normative Power in Managing South China Sea Disputes. *The Chinese Journal of International Politics*. Vol. 10 No.3
- Haryanto, Agus. Sengketa Laut Natuna Utara: Ancaman bagi Komunitas Keamanan ASEAN?. *Jurnal Global dan Strategis*, Vol. 9 No. 2
- Kartini, Indriana. 2015. Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya bagi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Wilayah*. vol. 6 no. 2. 2015
- Muhammad, Simela Victor. 2012. Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut Natuna Utara. *Jurnal HI*. Vol. IV No. 08/II/P3DI/April
- Odgaard, Lisolette. 2003. The South China Sea: ASEAN's Security Concerns About China. *SAGE Journal*. Vol. 34 No. 1
- Shen, Jianming. 2002. China's Sovereignty Over The South China Sea Islands: A Historical Perspective. *Chinese Journal of International Law*. Vol.1. No.1
- Yahuda, Michael. 2013. China's New Assertiveness in the South China Sea. *Journal of Contemporary China*. Vol. 22 No. 81
- Yani, Yanyan M, Ian Montramana. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik. *Jurnal Pertahanan*. Vol. 5.No. 2. 2015

Buku:

- Fanguang, Zeng&Feng Shengping. 2017. *Impian Tiongkok*. Jakarta: Kesaint Blanc
- Hayton, Bill. 2014. *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. London: Yale University Press
- Lo, Chi Kin Lo. 1989 *China's Policy towards Territorial Dispute: The Case of The South China Sea Island*. New York: Routledge
- Mearsheimer, John J. 2001.*The Tragedy of Great Power Politics*. New York&London:WWNorton&Comp
- Sukawarsini, Djelantik, 2015, *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama dan Relasi Antarkawasan*, Jakarta: Obor Indonesia
- Vitug, Marites Daungilan. 2018. *Rock Solid: How the Philippines Won Its Maritime Case Against China*. Philippines: BUGHAW
- Weber, Christina. 2001. *International Relations Theory (Second Edition)*. United Kingdom: Routledge
- Wicaksono, Michael. 2017. *Republik Rakyat China*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Yani, Yanyan Mochamad Yani. 2017. *Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yuan, Jing-Dong Yuan. 2001.*China-ASEAN Relations Perspective, Prospects and Implications for US Interests*. United States: Strategic Studies Institute
- Hong, Zhao. 2012.*China and India: The Quest for Energy Resources in the twenty-first century*. New York: Routledge

Website:

- Military Analysis. tersedia di <https://militaryanalysisonline.com> pada 08-01-2018

- Sholli, Sam. 28 Januari 2018.*China and Russia Threaten Japan After 'Enforcing' Claim to South China Sea with Military*. Express tersedia di www.express.co.uk diakses pada 18 Oktober 2018
- Buszynski, Leszek. 18 Januari 2017.*Why is the South China Sea so Important to the US*. The Conversation tersedia di theconversation.com diakses pada 18 Oktober 2018
- Wade, Geoff. 2016.*China's 'One Belt, One Road Initiative'*. Parliament of Australia, tersedia di <https://www.aph.gov.au>
- Felice, Elijah. 2017. *ASEAN Banking on China-led AIIB to Plug Infrastructure Gaps*. Bussiness Mirror tersedia di <https://businessmirror.com.ph> diakses pada 10 Oktober 2018
- 2019 Military Strength Ranking, 2019, Global Firepower, tersedia di <https://www.globalfirepower.com/countries>
- World Bank.*Military Expenditure (% of GDP)*, tersedia di <https://data.worldbanks.org> diakses pada 24 Januari 2019
- SCMP Reporter.*Explained: South China Sea Dispute*. The Week in Asia SCMP, tersedia di <https://www.scmp.com/week-asia/> diakses pada 15 Oktober 2018
- Robbins, Benjamin. 2017. *One Belt One Road and the History of the Maritime Silk Route*. E International Relations Students, tersedia di <http://www.e-ir.info/2017/03/26/one-belt-one-road-and-the-history-of-the-maritime-silk-route> diakses pada 15 Oktober 2018
- Yu, Miles Maochun Yu. 2016. *South China Sea: Beijing's Strategic Culture is Shaped by History*. The National Interest, tersedia di

- <https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/south-china-sea-beijings-strategic-culture-shaped-by-history-16145> diakses pada 12 November 2018
- New Era of China. China Global Television Network, tersedia di <https://cp.cgtn.com/> diakses pada 21 November 2018
- Tian, Le. 2017. *China in 2017: A proactive and confident approach to global diplomacy*. China Global Television Network, tersedia di https://news.cgtn.com/news/796b6a4e33637a6333566d54/share_p.html diakses pada 21 November 2018
- Firmly march on the path of socialism with Chinese characteristics in order to build a moderately prosperous society in all respects*. Renmin ribao (People's Daily). 18 November 2012 tersedia di: http://paper.people.com.cn/rmrb/html/201211/18/nw.D110000renmrb_20121118_3-01.htm dalam Shinji Yamaguchi, 2017, *Strategies of China's Maritime Actors in the South China Sea*,
- Li, Xue & Li Yongke. 2017. *The Belt and Road Initiative and China's Southeast Asia Diplomacy*. The Diplomat, tersedia di www.thediplomat.com diakses pada 27 Oktober 2018
- Abbate, Francesco & Silvia Rosina. 2016. *ASEAN-China Trade Growth: Facts, Factors and Prospects*. New Mandala tersedia di <http://www.newmandala.org/asean-china-trade-growth-facts-factors-and-prospects/> diakses pada 7 november 2018
- Rapoza, Kenneth. 2015. *Top 10 China Dependent Countries*. Forbes. Tersedia di <https://www.forbes.com/sites/kenra-poza/2015/11/26/top-10-china-dependentcountries/#49be03be492> diakses pada 7 November 2018

Paper:

- Clemens, Morgan. 2015. *The Maritime Silk Road and the PLA : A Paper for China as a "Maritime Power" Conference*. Virginia: CAN Conference Facility
- Pavlievic, Dragan & Agatha Kratz. 2017. *Testing the China Threat Paradigm: China's High-Speed Railway Diplomacy in Southeast Asia*
- Singh, Daljit. 2017. *China's White Paper on Security Cooperation in the Asia-Pacific Region and Chinese Grand Strategy*. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute
- Shekhar, Vibhanshu. 2012. *ASEAN's Response to the Rise of China: Deploying a Hedging Strategy*. SAGE Publications

Dokumen / Laporan Resmi:

- The State Council Information Office of the People's Republic of China. 2017. *China's Policies on Asia-Pacific Security Cooperation*
- Department of Defense United States of America. 2018. *Annual Report to Congress*. USA: Office of Secretary of Defense
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2018. *Transcript of Vice Foreign Minister Le Yucheng's Exclusive Interview with the Financial Times*, tersedia di https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1598897.shtml diakses pada 9 November 2018